



# Buletin Parlementaria

Nomor 1168/III/IX/2021 • September 2021



## Komisi X Pastikan Pon XX Papua Siap Digelar



**4** Ketua DPR Minta  
Pemerintah Tak  
Lengah Tangani  
Pandemi



**23** Perkuat Kerjasama,  
Gus Muhaimin  
Terima Kunjungan  
Dubas AS



9 772614 339005



BULETIN



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (paling kiri) memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau venue PON XX di Jayapura, Papua. Foto: Ayu/Man

# Komisi X Pastikan PON XX Papua Siap Digelar

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan Provinsi Papua telah siap menggelar Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-XX. Hal tersebut terungkap setelah Komisi X DPR RI meninjau langsung Stadion Utama Lukas Enembe yang akan dijadikan lokasi seremonial pembukaan dan penutupan PON XX, serta berbagai venue beberapa cabang olahraga.

"Hari ini Komisi X DPR RI mengunjungi Papua untuk melihat secara langsung persiapan penyelenggaraan PON XX Papua.

Dan setelah kami meninjau, melihat langsung stadion dan berbagai venue, kami berkeyakinan bahwa PON XX Papua siap digelar," ujar Fikri saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau venue *Aquatic* di Jayapura, Papua, Jumat (10/9).

Meski demikian, Fikri menyayangkan keberadaan stadion Lukas Enembe yang rencananya hanya dijadikan lokasi seremonial pembukaan dan penutupan PON XX Papua saja. Ia menilai stadion utama di Papua yang baru dibangun tersebut bertaraf internasional dan sejatinya juga bisa digelar pertandingan berbagai cabang olahraga.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano yang mengaku belum mengetahui alasan stadion kebanggaan rakyat Papua itu tidak dijadikan ajang pertandingan. Melainkan hanya menjadi tempat seremonial pembukaan dan penutupan PON XX Papua.

Tomi berharap pantia besar PON XX Papua, termasuk KONI Pusat mempertimbangkan agar di stadion utama tersebut bisa dijadikan tempat penyelenggaraan final cabang olahraga sepakbola dalam PON XX Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. ■ ayu/es

# Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Lengah Tangani Pandemi



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Ist/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah walapun laju penularan Covid-19 terus menurun. Ia menuturkan, walaupun euforia kasus Covid-19 menurun, kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, seperti tiga ribuan lebih orang yang kedatangan berkegiatan meski terpapar Covid-19.

“Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan *kendor*, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus lagi,” kata Puan, melalui rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (14/9).

Kementerian kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 3.830 orang berstatus ‘hitam’ terdeteksi berkegiatan di tempat umum termasuk mal, bandara, stasiun, transportasi umum, hingga restoran, lewat aplikasi PeduliLindungi. Status hitam sendiri

berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Karenanya, Puan meminta Satgas Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkegiatan di tempat umum. Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan (*tracing*). “Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tutur politisi PDI-P tersebut.

Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Corona berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan. “Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan *bed* bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar Puan. ■ rnm/er



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

**REDAKTUR**

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiaryah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**

Prima Danurirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Anief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Gerald Ople, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**

Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Muhammad Ali, Mulus Karyadi,

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Kunjungi Bio Farma, Komisi I Tinjau Pemenuhan Kebutuhan Vaksin

**V**aksinasi adalah jalan menuju kekebalan kelompok (herd-immunity) yang pada akhirnya menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan vaksin Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk melakukan pendalaman mengenai pelaksanaan diplomasi luar negeri di lapangan, Panja mengadakan kunjungan kerja ke PT Bio Farma (Persero) guna mengetahui bagaimana peran Bio Farma sebagai *holding* farmasi Indonesia



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI bertukar cenderamata dengan Dirut PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir beserta jajaran. Foto: Ria/Man

dalam implementasi diplomasi vaksin Covid-19 guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno

saat membuka rapat Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19 Komisi I DPR RI dengan Dirut PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/9).

Dari paparan yang disampaikan Dirut PT Bio Farma Honesti Basyir, Anton menyampaikan Komisi I mengapresiasi upaya diplomasi *holding* farmasi PT Bio Farma dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Namun, dari hasil pertemuan, Panja mencatat permasalahan dan hambatan dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, di antaranya ketergantungan bahan baku obat dan vaksin termasuk alat kesehatan dan diplomasi dalam memantau harga dan suplai vaksin dan koordinasi distribusi dengan pemda.

“Kami minta Bio Farma terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dalam menjalin kolaborasi internasional terkait diplomasi dan penyediaan vaksin, diplomasi pengembangan vaksin terkait kolaborasi riset dan transfer teknologi dan diplomasi dalam penyediaan obat dan alkes,” kata politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. ■ rnm/sf

## Komisi I Dorong Kalbe Farma Ambil Peranan dalam Diplomasi Vaksin

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari meminta PT Kalbe Farma ambil peranan dalam implementasi dan diplomasi Vaksin Covid-19 serta perkembangannya guna pemenuhan kebutuhan vaksin dalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan Kharis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Diplomasi Luar Negeri Komisi I DPR RI ke PT Kalbe Farma, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (10/9).

“Berkaitan dengan penanganan Covid-19, kita ingin tahu seberapa jauh peranan Kalbe Farma dalam penanganan Covid-19,” ucap Kharis.

Kharis menjelaskan, di beberapa



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari bertukar cenderamata dengan perwakilan Direksi Kalbe Farma. Foto: Hira/Man

negara di wilayah Afrika, produk Kalbe Farma mudah dijumpai. Sehingga, Komisi I ingin mendengarkan perluasan kinerja Kalbe Farma di luar negeri.

“Beberapa kali ke sana ada pameran produk. Produk Indonesia saya lihat juga ada di sana, Kalbe Farma juga,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah itu. ■ hal/es

# Setiap Jengkal Tanah Harus Bermanfaat Bagi Negara dan Rakyat



Foto bersama Panja Evaluasi HGU, HGB dan HPL Komisi II DPR RI dengan Gubernur Riau, Kakanwil BPN Riau, Kapolda Riau, Kajati Riau, dan Danrem Wira Bima usai pertemuan di Pekanbaru, Riau. (Foto: Sofyan/sf)

**K**etua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, Panja Evaluasi HGU, HGB dan HPL Komisi II DPR RI akan terus memetakan berbagai persoalan terkait hak-hak tanah yang dimiliki perusahaan ataupun rakyat yang kemudian menjadi masalah atau sengketa. Panja juga telah menginventarisir dan menemukan beberapa modus persoalan yang berkaitan dengan HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan) dan HPL (hak pengelolaan lahan). Doli memastikan, pihaknya akan menertibkan permasalahan tanah itu, karena setiap jengkal tanah di Indonesia harus mempunyai manfaat bagi negara dan rakyat.

“Panja ini dibentuk (untuk) bagaimana memastikan setiap jengkal tanah di republik ini harus punya manfaat bagi negara dan rakyat. Kita cari solusinya. Semua (pihak dapat) memberikan informasi, nanti akan kami tindaklanjuti. (Penyelesaian permasalahan tanah) ini membutuhkan dukungan kepada semua pihak,” kata

Doli usai memimpin pertemuan Panja Evaluasi HGU, HGB dan HPL Komisi II DPR RI dengan Gubernur Provinsi Riau Syamsuar, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau M. Syahrir, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI M. Syech Ismed, Kajati Riau Jaja Subagja, serta direksi PTPN V, PT Sinar Mas, PT Arara Abadi, PT Wilmar Group dan Pertamina Hulu Rokan di Pekanbaru, Riau, Senin (13/9).

Doli mengemukakan, setidaknya ada tiga modus yang Panja dapati dalam inventarisir permasalahan pertanahan tersebut. Pertama, ada modus negara telah memberikan HGU atau HPL kepada perusahaan dengan jumlah sekian hektar, namun pada kenyataannya tidak dimanfaatkan secara baik. Sehingga bisa dikategorikan tanah ditelantarkan, yang akhirnya tidak menjadi pendapatan bagi negara. Bahkan ada pihak yang mengagunkan atau menjaminkan tanah itu ke bank untuk mendapat kredit, lalu tanahnya tidak diurus. Panja akan menertibkan permasalahan tersebut.

“Kedua, ada juga modus diberikan hak (pengelolaan tanah) misalnya 10 ribu hektar, tapi dalam perjalanannya yang digarap lebih dari itu. Bahkan ratusan ribu hektar. Ini yang kemudian berhimpitan dengan hak-hak rakyat atau dengan perusahaan lain yang kemudian menjadi konflik. Pada akhirnya sisa yang digarap itu belum tentu masuk kepada pendapatan negara, baik di pusat maupun di daerah,” tandas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Berikutnya, masih kata Doli, adalah tanah tutupan atau ketelanjangan. Selama ini ada tanah-tanah yang diberikan hak untuk dikelola, namun beririsan dengan kawasan hutan. Ia mengakui hal ini sudah mulai ditertibkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mengeluarkan kebijakan agar permasalahan ini untuk diputihkan. Komisi II DPR RI mendapat informasi dari BPN, selisihnya masih cukup banyak. Setidaknya ada 16 juta hektar yang posisinya hak tanah itu beririsan dengan hutan, dan yang sudah terinventarisir sekitar 10 juta. Sementara 6 juta sisanya belum diketahui.

“(Permasalahan) itu salah satu yang terbesar di Riau. Kenapa kami datang ke Riau, karena memang banyak sekali modus-modus seperti itu terjadi, (namun) belum terselesaikan. Kami mendapat data soal (permasalahan pertanahan) PT Duta Alma, sampai mendapatkan masalah dengan masyarakat, kemudian masyarakat bereaksi berlebihan, masyarakat ditangkap. Padahal itu (terjadi) masalahnya di hilir. (Sementara) di hulu itu kepemilikan tanahnya yang berhadapan dengan rakyat. Kemudian masalah jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sekian tahun belum selesai, itu kan juga masalah,” kata Doli yang diamini Gubernur Riau Syamsuar. ■ sf

# Komisi III Apresiasi Polda NTB Tekan Laju Penularan Covid 19

**K**etua Komisi III DPR Herman Hery mengapresiasi kinerja Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menekan laju peningkatan angka penularan Covid 19. Dalam hal ini, Kapolda beserta jajaran telah berhasil dengan melakukan langkah-langkah yang strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melebihi kewajiban tugasnya.

“Selain itu, Kapolda juga berhasil mengkoordinasikan ke berbagai pihak dalam membantu penanganan Covid-19 seperti pemda, TNI, dan institusi lainnya. Kami telah melihat data yang dipaparkan oleh Kapolda, bahwa mereka telah melakukan terobosan sehingga berhasil melakukan tekanan terhadap pandemi,” ujar Herman saat memimpin Tim Kunspek Komisi III DPR RI mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Jumat (10/9).

Legislator dapil NTT II ini memaparkan, Polda NTB juga sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, yakni, akan diselenggarakannya *event* bertaraf internasional. Kemudian Polda NTB juga masih berhadapan dengan urusan lokal seperti pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit di Mandalika.

“Tentu ini tantangan yang tidak mudah untuk Kapolda. Oleh sebab itu, selain apresiasi yang kami berikan, kami juga mendukung Kapolda agar dapat menyelesaikan semua tantangan ini dengan cara yang persuasif, humanis, namun penuh dengan ketegasan,” imbuh Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal mengatakan, aksi dari kerja-kerja kolaboratif dengan semua *stakeholder* berhasil menurunkan angka penyebaran



Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat memimpin Tim Kunspek Komisi III DPR RI ke Mapolda NTB. Foto: Jaka/Man

Covid-19 di NTB sudah sangat baik. Hal ini terbukti dengan hampir seluruh kabupaten/kota masuk zona hijau.

“Jika kita melihat data capaian indikator dasar, hampir semua berada di bawah level nasional, termasuk angka kematian (CFR) walaupun di 3 wilayah seperti Lombok Barat, Lombok Tengah dan Mataram masih perlu berbenah. Selain itu, data *Positivity Rate* kita juga sudah sangat baik, dari

”

**KAMI JUGA MENDUKUNG KAPOLDA AGAR DAPAT MENYELESAIKAN SEMUA TANTANGAN INI DENGAN CARA YANG PERSUASIF, HUMANIS, NAMUN PENUH DENGAN KETEGASAN**

100 ribu orang hanya 3 orang yang terkena kasus positif,” jelas Iqbal.

Menurutnya, *tracing* yang merupakan upaya kolaboratif antara Babinkamtibmas, Babinsa, kelurahan dan pihak terlibat lainnya di NTB juga sangat membanggakan. Terbukti NTB berada di 3 besar level nasional setelah Sumatera Utara dan Jawa Timur.

“Yang membuat *tracing* kami baik, kita telah melakukan pelatihan secara masif para bintang yang terpilih, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke desa. Sehingga para *tracer* yang ada siap untuk di-*challenge* dan mereka punya kewajiban moral,” terangnya.

“Jika ada satu kasus positif, mereka akan membedah sampai ke rumah bahkan ke pekerjaannya. Mereka juga ditarget, 1 orang bintang minimal 113 titik untuk *tracing*, itulah yang menyebabkan angka positif cenderung menurun, karena kita cepat mengantisipasi sejak dini,” sambung Iqbal. ■jk/es



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Bali. Foto: Hanum/Man

# Komisi III Apresiasi Kinerja Polda Bali Tangani Covid-19

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi kepada Polisi Daerah (Polda) Bali terkait penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, seiring berjalannya waktu dan penanganan yang dilakukan jajaran Polda Bali bersama pemerintah daerah, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam angka kasus penyebaran Covid-19 di Pulau Dewata.

“Kapolda Bali menyikapi hal-hal terkait penanganan Covid-19 dengan

sangat baik dan luar biasa. Karena hingga hari ini saya tanyakan di dalam pertemuan, angka Covid-19 di Bali ini sudah semakin mengalami penurunan yang luar biasa,” ungkap Sahroni usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bali beserta jajaran di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Jumat (10/9).

Namun politisi Partai NasDem itu mengingatkan, meskipun adanya penurunan angka kasus yang signifikan, Polda Bali harus tetap melakukan pengawasan secara ketat agar

kenaikan angka kasus Covid-19 seperti sebelumnya tidak kembali terulang.

“Proses penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan dengan baik oleh Polda Bali harus terus dipertahankan. Namun tidak lupa dalam hal ini pariwisata juga. Kita berharap sekali untuk bisa cepat kedatangan wisatawan-wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi yang akan datang,” jelas legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Komisi III DPR RI turut fokus pada persoalan pandemi Covid-19 yang dihadapi masyarakat. Dimana hal tersebut merupakan fenomena sosial yang perlu ditanggulangi secara mendalam. Karena itu, melalui kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI berharap mendapatkan data, informasi dan masukan dari Polda Bali untuk dijadikan bahan dalam memberikan rekomendasi terkait perbaikan persoalan penanganan pandemi Covid-19. ■ hnm/sf

# Komisi IV Nilai Teknologi Informasi BROL di Perancak Sangat Luar Biasa

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin menilai teknologi informasi pada sistem pengawasan berbasis radar yang ada di Badan Riset Observasi Laut (BROL) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Perancak, Jembrana, Bali sangat luar biasa. Sistem pengawasan berbasis satelit yang mampu mendeteksi semua aktivitas yang ada di laut dan darat ini berfungsi untuk menjaga potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

“Saya mewakili Anggota Komisi IV DPR dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR menyampaikan terima kasih yang luar biasa, tadi kita melihat teknologinya di BROL sangat luar biasa. Ternyata salah satunya saya orang kampung juga, 12 tahun di Komisi IV DPR saya merasa bodoh dan merasa ketinggalan kalau di KKP itu ada suatu

tempat yang demikian canggih untuk memantau aktivitas di laut atau di darat,” papar Sudin saat memberikan sambutan usai meninjau Sistem Pengawasan Berbasis Radar bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BROL



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Sistem Pengawasan Berbasis Radar di BROL Perancak, Jembrana, Bali. Foto: Suci/Man

Perancak, Jembrana, Bali, Kamis (9/9).

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini menyampaikan, dari sembilan *platform* yang akan dikembangkan untuk mengawasi seluruh pergerakan di laut, baru dua yang sudah dapat diaplikasikan dan membutuhkan biaya kurang lebih Rp70 miliar akan menjadi pemikiran Komisi IV DPR RI. Dua aplikasi yang sudah dapat dioperasikan BROL antara lain untuk mendeteksi praktik *illegal unreported and unregulated* (IUU) *fishing* dan tumpahan minyak di perairan Indonesia.

“Tadi juga kita melihat perkembangan yang akan dicapai dan apa yang diinginkan, hanya saya bertanya, benar *nggak* sembilan (*platform*) ini berjalan, langsung disambut Pak Budi (Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan), Alhamdulillah baru

## Sampingkan Ego Sektoral, Harus Memanusiakan Manusia

**A**nggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan baik perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sekitar harus saling bergotong royong merawat alam. Menurutnya, memanusiakan manusia menjadi elemen terpenting agar kelestarian hutan terjaga. Oleh

karena itu, ego sektoral harus segera dikesampingkan.

“Apapun yang terjadi saya yakin mereka akan menjaga hutan ini dengan baik apabila saling diperlakukan dengan baik, sehingga bagaimana memanusiakan manusia itu yang sangat penting di dalam hal ini.” ungkap Riezky usai mengikuti Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi IV DPR RI ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (9/9).

Sebelumnya, saat meninjau dan berdiskusi, dirinya menekankan bahwa ANTAM sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun harus memberikan kontribusi jangka panjang kepada masyarakat.

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu, hal tersebut menjadi penting agar masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya secara mandiri dan tidak menggantungkan



dua, jadi masih kurang tujuh. Kalau satu *item* itu kurang lebih Rp10 miliar berarti kurangnya Rp70 miliar hanya untuk *software*-nya harus menjadi pemikiran Komisi IV DPR,” jelasnya.

Sudin menyampaikan dengan teknologi yang dimiliki mudah-mudahan kita dapat mendeteksi pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia. “Kalau kita melihat tempat ini yang sudah bagus semuanya, Insya Allah sebelum orang mencuri ikan kita sudah tahu,” imbuh Sudin sembari menyinggung masalah anggaran yang mengalami pemotongan, termasuk anggaran KKP. Menurutnya ini menjadi tantangan seluruh Anggota Komisi IV DPR bahwa perairan negara Indonesia yang demikian luas perlu pengawasan ekstra dan butuh anggaran yang cukup.

“Negara kita negara yang sangat besar sekali, yang sangat luar biasa besar. Contoh Kalimantan itu satu setengah Pulau Jawa, belum Bali. Bagaimana kita mau menjaga kedaulatan kelautan kita kalau anggarannya kecil sekali. Ini tadi kita lihat sangat hebat sekali. Tapi bagaimana kalau kapal patrolinya hanya bekerja 100 hari dalam setahun, bagaimana mau menangkap kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia, bagaimana mau menjaga kedaulatan kelautan Indonesia. Ini menjadi tantangan kita semua Anggota Komisi IV DPR,” terang Sudin. ■ *sc/sf*

hidup mereka dengan perusahaan. Kontribusi tersebut bisa berupa pemberian lahan pertanian berikut beserta pelatihannya, perbaikan akses jalan umum, dan kesehatan.

“Alangkah baiknya fasilitas pelayanan umum masyarakat diutamakan. Kalau CSR *sorry* banget ya kita harus sampaikan terkadang berbentuk sembako atau apa, kasihan masyarakatnya. Masyarakat kita itu butuh untuk jangka panjang. Akan lebih baik pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan teman-teman KLHK sehingga bisa dipakai secara turun-temurun,” urai Riezky. ■ *ts/sf*

# Petani Cabai Perlu Didorong untuk Penuhi Kebutuhan Industri



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau pabrik pengolahan cabai PT Ayo Tani di Kediri, Jatim. Foto: Bianca/Man

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan seharusnya ada stabilisasi harga cabai. Mengingat di Indonesia, utamanya di Kabupaten Kediri, ada industri pengolahan cabai dengan kapasitas yang cukup besar. Menurutnya, untuk mencapai stabilitas tersebut petani perlu didorong untuk memenuhi kebutuhan industri.

“Kita mempertemukan antara petani, lalu kemudian industri juga agar bisa menyerap sebaik-baiknya dan bahkan tadi dengan pemerintah daerah juga untuk mengedukasi masyarakat supaya memenuhi kebutuhan dari industri,” ungkap Anggia usai memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke PT Ayo Tani, di Kediri, Jawa Timur, Kamis (9/9).

Lebih lanjut Anggia menilai, kerja sama antar petani cabai dengan industri sangat diperlukan dan akan bermanfaat dalam menyerap ketersediaan cabai di Indonesia. Sebab, melalui industri, menurut Anggia, cabai dapat diolah menjadi berbagai produk olahan yang bernilai tinggi, seperti salah satunya produk olahan pasta cabai.

Untuk itu, tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, petani cabai perlu didorong agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk industri. “Dan segala infrastruktur kayak tadi ada salah satu kepala desa mengatakan tentang jalan usaha taninya yang perlu diperbaiki, seperti itu,” ungkap Anggia. ■ *bia/sf*



Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia. Foto: Saum/Man

# Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Pekalongan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bertukar cendramata usai memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Foto: Dipa/Man

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meninjau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tim Komisi V DPR RI juga menggelar pertemuan dengan Bupati Pekalongan dan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

guna membahas rencana peningkatan kapasitas jalan strategis penghubung obyek wisata dan pusat ekonomi masyarakat di Pekalongan.

“Hasil kunjungan yang kita ekspos dari Pemerintah Kabupaten memang menjadi penting bagi pembahasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang harus segera diubah. Di dalam UU Jalan ini, ada tingkatan kewenangannya, yaitu pusat,

provinsi dan kabupaten. Jika terbagi seperti ini, ada sejumlah kabupaten di Indonesia yang tidak akan sanggup menyelesaikan tugas-tugas pokok terkait persoalan infrastruktur jalan,” tutur Ridwan di Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (8/9).

Politisi Partai Golkar itu menilai UU Jalan yang berlaku saat ini harus segera direvisi. Ia melihat banyak kabupaten di Indonesia, salah satunya Kabupaten Pekalongan yang kewalahan, bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan mengenai infrastruktur ini.

“Makanya, UU Jalan harus kita ubah, salah satu jalan keluarnya adalah pusat harus bisa menyelesaikan persoalan jalan provinsi dan kabupaten, bilamana kabupaten dan provinsi tidak mampu melaksanakan itu. Nah hari ini, Pekalongan salah satunya sebagai contoh yang mengalami kendala itu. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya, yang mana UU yang baru di tahun 2022 ini bisa terselesaikan,” pungkash Ridwan. ■ dip/sf

## Komisi V Harap Rusun STAI PERSIS Ciptakan Generasi Gemilang

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai pembangunan rumah susun (rusun) di lingkungan pendidikan merupakan langkah yang baik. Perlu diketahui bahwa pembangunan Rusun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) PERSIS merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung terwujudnya penyediaan hunian layak di kawasan lingkungan pendidikan.

“Dibangunnya rusun di lingkungan pendidikan ini cukup baik. Pertama, mahasiswa yang datangnya dari jauh dan tidak ada pemukiman di sini, bisa bermukim di (rusun) sini. Yang kedua, dari aspek pendidikan, dengan berada

di sini lebih banyak waktu mereka untuk belajar, sehingga akan lebih baik bagi mereka yang tinggal di lingkungan ini,” kata Syarief usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Rusun STAI PERSIS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9).

Syarief melanjutkan, pembangunan rusun ini merupakan langkah yang tepat serta dapat meringankan pihak pengelola perguruan tinggi dan bagi mahasiswa yang belajar di sana.

“Tentu ke depan kita harapkan cukup banyak rusun seperti ini, walaupun memang sekarang kondisi ini kita sadari bersama pada masa pandemi ini

# Bendungan Kuningan Diharapkan Beri Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Kuningan yang operasionalnya telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 31 Agustus 2021 lalu. Diharapkan, kehadiran bendungan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Kuningan di Kecamatan Cibeureum, Kuningan, Jawa Barat, Rabu (8/9). Hadir dalam pertemuan Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, Pejabat BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dirjen Pengairan Kementerian PUPR, dan *stakeholder* lainnya.

Arwani menyampaikan, kunjungan Komisi V DPR RI ini untuk mengetahui



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi dalam foto bersama saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Kuningan di Kecamatan Cibeureum, Kuningan, Jawa Barat, Rabu (8/9/2021). Foto: Anne/Man

secara lebih rinci mengenai proses pembangunan dan anggaran Bendungan Kuningan. “Komisi V melihat bahwa pembangunan Bendungan Kuningan berjalan dengan baik. Karena itu, harus kita

jaga bersama, kita rawat sehingga pemanfaatan bendungan kuningan nantinya bisa maksimal dan dirasakan masyarakat,” kata Arwani usai peninjauan.

Selain memberikan manfaat di sektor pertanian, bendungan ini juga dapat berfungsi sebagai ketahanan air dalam pengendalian banjir di beberapa daerah Jabar bagian timur dan sebagian untuk Jateng. Sisi lain, ke depannya Bendungan Kuningan juga berpotensi sebagai ikon wisata.

“Mari kita jaga rawat bersama bendungan ini, sehingga pemeliharaan harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana infrastruktur ini mampu betul-betul pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ada bendungan, maka kita harapkan produksi pertanian akan naik, sektor pariwisata juga akan naik. UMKM bisa terangkat dan tentu pemanfaatan di bidang kelistrikan juga akan bisa kita rasakan,” imbuh Arwani. ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Rusun STAI PERSIS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: Aisyah/Man

ada *refocusing* anggaran. Tetapi kita berharap mudah-mudahan ini selesai semua, tentu kita berdoa supaya virus Covid-19 ini cepat selesai, kita normal kembali membangun. Tentu pembangunan rusun ini juga menjadi catatan untuk kita, untuk membuat lebih banyak terutama di tempat perguruan tinggi,” harap Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

■ ais/sf

# Komisi VII Apresiasi Kebun Raya Eka Karya Bali Sebagai Karya Anak Bangsa

**K**etua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai Kebun Raya Eka Karya yang berada di bawah pengelolaan LIPI sudah sangat baik dan layak, sebagaimana fungsi dan tugasnya yakni memadukan penelitian botani, pelestarian tumbuhan, pendidikan, dan rekreasi. Sugeng turut mengapresiasi Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan karya anak bangsa yang dibangun sejak 15 Juli tahun 1959, dengan luas kawasan 157,5 hektar.

Sugeng mengungkapkan hal tersebut usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN Agus Haryono, Kepala Kebun Raya Bali Didit Okta Pribadi di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (9/9). Saat ini keberadaan KR bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Di samping menjalankan fungsi edukasi, pendidikan, penelitian, riset dan juga sebagai fungsi konservasi penyelamatan berbagai tumbuhan yang ada maupun yang terancam punah.

“Sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar di dunia. Mengingat pentingnya biodiversitas bagi kehidupan manusia, maka setiap unsurnya menjadi aset jangka panjang yang perlu terus menerus dipelajari, dikaji, diteliti dan dilestarikan,” kata politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Sugeng mengatakan, dari kunjungan ini, pihaknya menemukan

sejumlah inspirasi yang nantinya akan dibahas bersama Komisi VII. “Saya menginginkan agar nantinya kebun raya bisa menjadi gerakan nasional di masing-masing kabupaten/kota. Yang diharapkan bisa dibangun di lahan-lahan kritis, lahan yang tidak dipergunakan,” harap Sugeng.

Sugeng melanjutkan, dengan banyaknya sumber hayati yang diteliti, baik dari segi manfaatnya untuk pangan maupun obat-obatan, diharapkan ke depannya Indonesia benar-benar mandiri dalam memenuhi bahan baku obat, sehingga tidak lagi harus impor. “Dimana saat ini 92 persen bahan baku obat harus impor,” tandas Sugeng.

“Pada dasarnya Indonesia memiliki sumber hayati yang sangat luar biasa banyak yang bisa di manfaatkan, maka dari itu saya meminta kepada BRIN serta Kementerian Perindustrian agar bisa hilirisasi, dari riset inovasi bisa menghasilkan sebuah produk industri. Dari hasil penelitian sudah ada, seharusnya menjadi produk-produk yang berguna bagi masyarakat tidak hanya sebagai pajangan di perpustakaan,” harap Sugeng. ■ rni/sf



Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Kebun Raya Eka Karya di Tabanan, Bali. Foto: Rumi/Man

## Kembangkan Industri Pertahanan, PT Len Industri Harus Jadi Pionir Capai TKDN

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berharap PT Len Industri menjadi pionir dalam mencapai Tingkat

# Komisi VII Dorong Krakatau Steel Hidupkan Industri dalam Negeri



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman (kiri) saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau berbagai fasilitas PT Krakatau Steel Tbk di Cilegon, Banten. Foto: Rizki/Man

**K**omisi VII DPR RI menilai bahwasanya saat ini PT Krakatau Steel (Persero) sangat mampu memenuhi

permintaan dan memenuhi kebutuhan plat baja terkait produksi industri dalam negeri. Bahkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ketika memproduksi produk-produknya. Sehingga industri pertahanan di Indonesia semakin bisa dikembangkan.

“Banyak yang kami serap, khususnya dari aspek kemajuan teknologi yang sudah bisa dilaksanakan PT Len untuk memenuhi berbagai kebutuhan terutama untuk pertahanan, pengembangan solar panel sehingga nanti bisa mengembangkan PLTS lebih banyak lagi dengan kandungan dalam negeri yang lebih tinggi,” ucap Eddy saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke PT Len Industri (Persero), di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/9).

Politisi PAN ini menambahkan, nantinya PT Len akan bertransformasi

menjadi *holding company* dan berkonsolidasi dengan lima anak perusahaannya. “Oleh karenanya, PT Len Industri ditugaskan sebagai *lead integrator holding* BUMN Industri Pertahanan (Indhan) yang terdiri dari Len Industri, Pindad, Dirgantara Indonesia, Dahana, dan PAL Indonesia,” kata Eddy.

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menyusun aturan baru terkait PLTS Atap yang terhubung pada jaringan listrik dalam rangka mendorong pemanfaatan PLTS di Indonesia. Dalam draf aturan tersebut, pelanggan PLTS Atap dapat mengeksport listrik kepada PLN.

“Perubahan bisa kita mulai dari kita

Abdurahman menilai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut telah mampu memenuhi harapan pemerintah dengan mengimplementasikan teknologi industri 4.0 yang diterapkan pada produksinya.

“PT Krakatau Steel sudah berhasil dan mampu memproduksi salah satu produk koil baja dengan teknologi yang luar biasa, menyesuaikan teknologi yang diharapkan Kementerian Perindustrian yaitu Teknologi 4.0” kata Maman saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau langsung berbagai fasilitas PT Krakatau Steel Tbk di Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (9/9).

Lebih lanjut Maman mendorong partisipasi sebesar-besarnya dari seluruh pihak untuk menghidupkan industri dalam negeri, terutama industri baja sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang kebutuhan bahan baku bagi industri lainnya. Dirinya juga mengatakan, Komisi VII DPR RI mendorong adanya beberapa regulasi yang pro terhadap upaya meningkatkan produksi industri dalam negeri seperti yang dilakukan Krakatau Steel. ■ rr/sf

sendiri, makanya saya tergerak untuk meng-*install* PLTS rooftop di rumah. Saya merasa ini adalah kontribusi saya dalam mengurangi emisi karbon,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

■ opi/es

Wakil Ketua  
Komisi VII DPR RI  
Eddy Soeparno.  
Foto: Geraldi/Man



# Komisi VIII Dorong Peningkatan Status UPT BNPB Padang



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau fasilitas dan sarpras Gedung UPT BNPB di Padang, Sumbar. Foto: Andri/Man

**K**omisi VIII DPR RI mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Bencana di Padang ditingkatkan statusnya menjadi Balai Besar Logistik dan Diklat BNPB. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, peningkatan status tersebut penting dilakukan karena untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa dan tsunami di wilayah Sumatera. Dimana, Sumatera Barat akan diproyeksikan sebagai pusat penanggulangan bencana untuk regional Sumatera.

“UPT BNPB Padang nantinya akan naik kelas menjadi Balai Besar Logistik serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB. Nantinya, gedung ini akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatera,” ujar Yandri saat meninjau Gedung UPT BNPB di Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/9).

Diungkapkan Yandri, hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri PAN-RB. Ke depannya, selain

berfungsi sebagai gudang logistik, juga akan menjadi tempat pelatihan khususnya untuk memperkuat sumber daya manusia dan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) regional Sumatera.

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menyampaikan beberapa persyaratan dari Menteri PAN-RB yang harus dipenuhi. “Pertama, adanya lahan tanah dan bangunan. Kedua, adanya personel atau Sumber Daya Manusia. Ketiga, adanya aktifitas dan program,” ungkap Yandri seraya menambahkan, ke depannya Balai Besar akan dipimpin oleh pejabat setingkat direktur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menyebutkan alih status menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan tersebut akan menguntungkan masyarakat Sumbar, karena akan mempercepat penanganan bencana alam dan menjadi lebih baik lagi.

Mahyeldi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan fasilitas Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB di Padang. Salah satu bentuk dukungan tersebut yaitu melakukan penambahan hibah lahan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan menuturkan alih aset UPT dan Pusdalops Penanggulangan Bencana menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan sudah dilakukan, sehingga pengelolaannya akan langsung di bawah BNPB. ■ man/es

## Komisi VIII Serahkan Bansos PKH di Batang

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai yang merupakan program prioritas nasional melalui Kementerian Sosial tahun

2021. Ace mengungkapkan, Komisi VIII dalam penyerahan bantuan itu sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Ace usai penyerahan PKH kepada perwakilan masyarakat Batang yang disaksikan Bupati Batang Wihaji, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media

# Komisi VIII Dorong Optimalisasi Fasilitas Panti Jompo dan Penyandang Disabilitas



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan pengelola dan penghuni panti jompo dan penyandang disabilitas Yayasan Bunga Bali Penyandang Disabilitas, di Bali. Foto: Prima/Man

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan perlu adanya optimalisasi terkait dengan peningkatan dan pengawasan layanan fasilitas panti jompo dan penyandang disabilitas. Menurutnya

dalam masa-masa sulit seperti ini, kesejahteraan para penghuni panti jompo dan para penyandang disabilitas harus tetap dimaksimalkan baik itu dalam bentuk alat bantu serta modal usaha.

“Pertama, kita ke sini ingin melihat secara langsung kondisi panti dan

membawa sedikit bantuan untuk saudara-saudara kita di panti dalam kondisi pandemi dan untuk sebagai bahan pembahasan rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial,” ujar Diah saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Yayasan Bunga Bali Penyandang Disabilitas, di Bali, Rabu (8/9).

Diah juga mengingatkan, persoalan yang terjadi di panti sosial tidak semata-mata hanya bantuan sosial. Masih banyak permasalahan seperti yang harus terus ditingkatkan seperti peningkatan pelayanan dan fasilitas panti.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, dalam kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan fasilitas anti berupa alat bantu jalan, kursi roda serta beberapa perlengkapan dapur agar bisa dimanfaatkan untuk wirausaha para penyandang disabilitas. ■ pdt/es

Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, Kemenag, Bank Himbara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Bupati Batang, Jateng, Kamis (9/9).

“Agenda meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat terus menjadi program prioritas Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial serta Pemerintah Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya, melalui program pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas seperti Program Keluarga Harapan atau yang sering

dikenal dengan PKH,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Ace mengharapkan manfaat PKH mampu mencapai tujuan PKH itu sendiri. Di antaranya meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Serta, meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak usia wajib belajar SD-SMP dari RTSM dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi bagi rumah tangga.

Ace menyampaikan, PKH bermanfaat merubah perilaku keluarga dalam memberikan perhatian besar kepada

pendidikan dan kesehatan anak. Kedua, memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Ketiga, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas hidup dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (*price effect* dan *insurance effect*). ■ pun/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Puntho/Man

# Sambut WSBK, Komisi IX Bawa 50 ribu Dosis Vaksin Untuk NTB



Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menyerahkan bantuan vaksin Covid-19 kepada masyarakat NTB yang diterima Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Foto: Oji/Man

**D**alam rangka mendukung dan mensukseskan percepatan vaksinasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah even internasional World Superbike (WSBK) pada November mendatang, Komisi IX DPR RI menyerahkan tambahan vaksin sebanyak 50 ribu dosis dan alat rapid antigen sejumlah 50 ribu untuk masyarakat NTB.

Bantuan tersebut diserahkan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (9/9). Charles mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong-royong bersama seluruh elemen masyarakat mendukung upaya percepatan vaksinasi.

“Hari ini kami membawa tambahan vaksin Covid-19 50 ribu dosis untuk mempercepat vaksinasi di NTB. Karena kami juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap

distribusi vaksin. Selain itu, rapid antigen ini diperlukan untuk menambah jumlah *testing* dan *tracing* di NTB guna menekan angka penyebaran Covid-19”, jelas Anggota F-PDIP tersebut.

Senada dengan Charles, Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendorong Pemprov NTB bersinergi dengan

Kemenkes untuk melakukan segala upaya menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses percepatan vaksinasi. “Mengenai *cold chain* (rantai dingin) merupakan sebuah sistem rantai pasok vaksin yang mempertimbangkan tingkatan suhu dalam prosesnya. Ini perlu diperkuat agar kualitas vaksin terjaga dan tidak mengganggu alur distribusi vaksin,” kata Elva lebih lanjut.

Legislator dapil Bengkulu ini menegaskan Komisi IX DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem dan tata kelola vaksin Covid-19, khususnya distribusi vaksin sampai ke sentra vaksinasi yang saat ini masih belum optimal pelaksanaannya.

Di lain pihak, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan untuk menyukseskan berbagai gelaran internasional di NTB, seperti World Superbike dan MotoGP di Sirkuit Mandalika, percepatan program vaksinasi yang ditargetkan harus mencapai 70 persen. “Percepatan vaksinasi merupakan fokus NTB saat ini. Kami mengapresiasi Komisi IX DPR RI yang mendukung program vaksinasi di NTB,” ujar Zulkieflimansyah.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi di wilayah itu. Hanya saja, sering terkendala ketersediaan vaksin dari pusat. “Kami siap melakukan vaksinasi, sekarang tinggal ketersediaan vaksin saja yang kurang,” pungkasnya. ■ oji/es

## Komisi IX Apresiasi Penerapan Wolbachia untuk Tekan Kasus DBD di Sleman

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengapresiasi penerapan Metode Wolbachia untuk menekan tingkat penularan kasus DBD di Kabupaten Sleman. Mengingat, demam berdarah yang

disebabkan oleh virus dengue ini berpotensi menjadi *double burdened of disease* (beban ganda penyakit infeksi) di masa pandemi Covid-19.

“Wolbachia berasal dari bakteri alami yang terdapat dalam 60 persen jenis serangga. Bakteri Wolbachia yang ada di tubuh nyamuk aedes aegypti disebarkan



# Komisi IX Dorong Lampung Percepat Laju Vaksinasi 300 Ribu Dosis per Hari

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mempercepat laju vaksinasi sebesar 300 ribu dosis per hari. Posalnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kesehatan RI disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa provinsi Lampung termasuk dalam daerah dengan tingkat vaksinasi paling rendah di seluruh Indonesia.

“Beberapa kali dalam laporan dari Kemenkes, Lampung ini adalah provinsi yang paling rendah tingkat vaksinasinya. Kita ingin tahu ada persoalan apa. Maka pada hari ini setelah dilakukan elaborasi dan diskusi dengan Kemenkes terkait distribusi vaksin, dan mereka (Kemenkes, **red**) akan menyiapkan vaksin serta mendorong agar Pemprov

Lampung mampu percepat laju vaksinasi dengan target 300 ribu dosis per hari,” jelas Ninik, sapaan akrabnya, usai memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Provinsi Lampung, Kamis (9/9).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk mendukung peningkatan vaksin di seluruh daerah di Indonesia sebagai salah satu upaya mengendalikan pandemi.

“Orang yang menjadi target vaksinasi ini akan terus bertambah. Misalnya dulu hanya boleh untuk umur 18 sampai 59 tahun, tapi sekarang ibu hamil, di atas 59 tahun, serta anak umur 12 tahun pun diperbolehkan dan menjadi target vaksinasi. Karena memang salah satu kunci untuk segera menyelesaikan pandemi ini adalah dengan vaksinasi. Dengan vaksin, tentu dapat menekan efek atau gejala dari Covid-19.

Terakhir Ninik menilai, kunjungan Komisi IX ke Lampung ini dinilai cukup efektif. Dikarenakan persoalan terkait akses dan ketersediaan vaksin sudah teratasi melalui penambahan kuota vaksin dari Kemenkes bagi Lampung.

“Komisi IX berjanji untuk membantu Pemprov Lampung berkomunikasi langsung dengan Menkes, agar bisa memperoleh prioritas vaksin, sehingga nantinya data terkait tingkat vaksinasi antar daerah tidak terlalu jomplang, mengingat vaksinasi masih cukup rendah bagi Indonesia secara umum,” tandas politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III itu. ■ **tra/es**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Foto: Tiara/Man



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar (tengah) memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI. Foto: Chasbi/Man

melalui hasil perkawinan nyamuk ber-Wolbachia dengan nyamuk lokal. Dengan demikian diharapkan akan melindungi masyarakat dari penularan DBD secara terus menerus,” kata Ansory saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/9).

Legislator Fraksi PKS tersebut mendukung metode Wolbachia yang merupakan inovasi program pengendalian DBD. Hal ini juga sejalan dengan strategi nasional

penanggulangan DBD 2021-2025. Tidak hanya di Sleman, diharapkan metode Wolbachia juga dapat diaplikasikan di daerah-daerah lain.

“Hasilnya sudah dipublikasikan di New England Journal of Medicine dan menunjukkan bahwa Aplikasi Wolbachia untuk Eliminasi Dengeu (AWED) efektif menurunkan 77,1 persen kasus *dengeu* dan menurunkan kebutuhan perawatan (inpatient) rumah sakit hingga 86,2 persen. Teknologi ini juga terbukti efektif, aman dan ramah lingkungan,” tambah Ansory. ■ **cas/es**

# Komisi X Kunjungi Venue PON XX



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau venue PON XX, di Jayapura, Papua. Foto: Agung/Man

**K**omisi X DPR RI meninjau venue pertandingan olahraga untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua. Tim yang diketuai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin

itu mengunjungi Kabupaten Mimika yang termasuk dalam tiga kabupaten/kota yang akan memfasilitasi ajang olahraga nasional tersebut pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Komisi X DPR RI, kata Hetifah, ingin melihat bagaimana persiapan PON

XX di Kabupaten Mimika mengingat acara akan berlangsung dalam waktu dekat. “Kami merasa optimistis (PON XX) akan berjalan lancar, memang dengan beberapa catatan,” ujarnya saat mengunjungi venue PON XX di Mimika, Papua, Jumat (10/9).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap dengan kedatangan Komisi X DPR RI akan memberikan semangat bagi pemerintah daerah dan insan olahraga dalam mempercepat dan memaksimalkan PON di Papua. Dari segi infrastruktur dan akomodasi, Hetifah mengakui bahwa realisasinya di Mimika sudah baik dan di luar ekspektasi awal Komisi X DPR RI.

Namun demikian terdapat beberapa catatan, salah satunya euforia dan antusiasme menjelang PON XX di Mimika dirasakan masih belum terlalu besar. Sementara itu geliat ekonomi masyarakat menjelang PON XX juga masih belum terlihat, sehingga Hetifah berharap ada upaya untuk menggalakkan animo terhadap perhelatan akbar olahraga se-Indonesia itu. ■ ah/sf

## Perlu Afirmasi Pemerintah untuk Tambah Anggaran PON XX Papua

**A**nggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk menambah anggaran sebesar Rp1,4 triliun bagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Provinsi Papua, pada 2-15 Oktober 2021 mendatang. Dalam keterangan yang diterima Komisi X DPR RI, anggaran penyelenggaraan PON XX yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, sudah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun.

“Sementara APBN (yang dianggarkan) oleh Menpora sudah

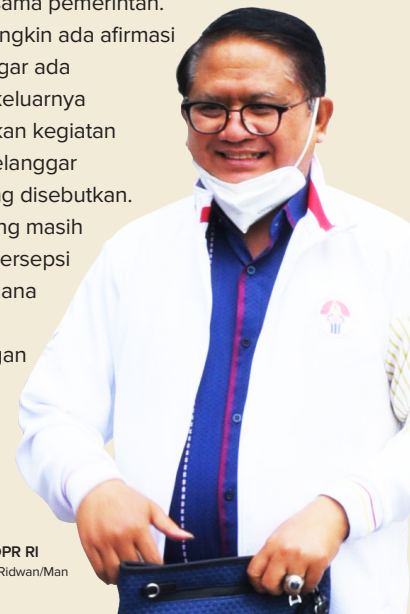
selesai yaitu Rp1,7 triliun. Jadi tidak mungkin kalau menggunakan dana dari APBN lewat Kemenpora. Karena itu semoga nanti ada teman dari DPRD (Papua) yang akan ke Jakarta menemui langsung Presiden atau menteri terkait, nanti semoga ada jalan keluarnya,” ujar Mujib di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan persiapan dan meninjau sejumlah venue PON XX, di Jayapura, Papua, Sabtu (11/9).

Di sisi lain, jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi X DPR RI mengingatkan proses pengalokasian anggaran harus tertib administrasinya. Jika menggunakan anggaran lewat APBN, tambah Mujib, maka waktunya

tidak memungkinkan karena memiliki mekanisme pembahasan yang panjang, karena perlu didiskusikan kembali di internal Komisi X DPR RI dan pembahasan bersama pemerintah.

“Karena itu mungkin ada afirmasi dari pemerintah agar ada bagaimana jalan keluarnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa melanggar ketentuan UU yang disebutkan. Barangkali memang masih perlu kesamaan persepsi mengenai bagaimana agar ini bisa diselesaikan dengan baik,” harapnya. ■

rdn/sf



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat. Foto: Ridwan/Man

# Masukan Rakyat NTT Jadi Semangat Baleb Sejahterakan Masyarakat Indonesia

**A**nggota Badan Legislasi (Baleb) DPR RI Syamsurizal mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar bisa mensejahterakan rakyatnya, membutuhkan sejumlah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI. Hal ini menurutnya jadi pelecut semangat bagi Baleb untuk dapat segera menyelesaikan RUU yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di seluruh Indonesia yang terdapat dalam RUU Prioritas Tahun 2021.

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin Tim Kunjungan Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2021 Baleb DPR, melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT beserta perangkatnya di Kantor Gubernur NTT, Kupang, NTT, Kamis (9/9). Syamsurizal pun mengakui antusiasme dan kesadaran rakyat NTT terhadap Tata Peraturan Perundangan sangat tinggi, sehingga Baleb banyak sekali mendapat masukan berharga.

“Saya kira apa yang disampaikan mereka itu sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini sudah kita rekam dan akan jadi masukan-masukan kita. Dan ini menjadikan bagaimana ini adalah mencerminkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama NTT adalah sebagai kawasan yang terdiri dari pulau-pulau, ada lima pulau besar di sini dan juga laut yang menjadi jembatan mereka pun ini juga menjadi persoalan,” jelas Syamsurizal lebih lanjut.

Politisi yang akrab disapa Syam ini menyadari banyaknya RUU yang



Foto bersama Baleb DPR RI dengan Wakil Gubernur NTT beserta jajarannya. Foto: Erlangga/Man

masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 yang harus segera diselesaikan, terutama untuk memberi kepastian hukum masyarakat yang tinggal di timur Indonesia. “Ada masalah hukum adat, soal daerah kepulauan, kemudian persoalan persengketaan daerah-daerah. Mungkin kita juga berharap soal UU Pertanahan kita, soal PTSL itu perlu kita kaji, karena itu juga menimbulkan sengketa lahan antara masyarakat di daerah,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini mengatakan, masukan-masukan berharga tersebut akan segera menjadi pembahasan di tingkat pusat antara

DPR bersama pemerintah. Ia pun berharap apa yang menjadi aspirasi rakyat NTT bisa segera menjadi ikhtiar bersama untuk diselesaikan di tingkat pusat, sehingga kemudian bisa berlaku umum secara nasional.

“Kita akan tuangkan ini semua ke dalam RUU yang ada, yang akan kita masukkan. Jadi ada 33 UU Prioritas Nasional kita, di prolegnas kita. Jadi banyak sisi yang akan kita lihat secara politis juga, ekonomi juga, secara hukum, dan hal-hal yang bersifat akademis juga menjadi pertimbangan kita. Ini akan sangat berguna,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Riau I tersebut menutup pernyataannya. ■ *er/sf*

# Kabupaten Bangli Miliki Ketahanan Ekonomi Kuat Hadapi Pandemi

**W**akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan, Kabupaten Bangli memiliki segala potensi yang besar melalui produk lokal, kearifan lokal, destinasi lokal yang bisa digaungkan di seluruh penjuru dunia.

Hal ini disampaikan Putu pada kegiatan BKSAP *Sustainable Development Goals (SDGs) Day* di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Selasa (14/9). Kegiatan ini mengangkat tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam Pencapaian SDGs dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”.

“Penerapan SDGs itu sangat melekat di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Di sini pembangunan pariwisata secara

terfokus dan terpusat, ada 31 desa wisata termasuk yang paling banyak. Artinya keterlibatan masyarakat dalam pariwisata itu penting dan itu poin penting dalam SDGs,” ujar Putu.

”

**APAPUN YANG INGIN DICAPAI BANGLI DAN DAERAH-DAERAH LAIN, KAMI DUKUNG, KAMI DORONG UNTUK DIGAUNGKAN DALAM DIPLOMASI PARLEMEN DI SELURUH DUNIA**

Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan salah satu destinasi wisata Danau Batur yang menjadi penyuplai air untuk Bali. “Ini diharapkan agar dijaga terus. Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi lebih banyak lagi memberikan support terhadap Kabupaten Bangli,” ujarnya.

Politisi dapil Bali ini menekankan, BKSAP menjadi penjuror komunikasi, penjuror untuk melakukan promosi segala kearifan lokal. Segala kekuatan dari daerah yang akan digaungkan di seluruh penjuru dunia tentang bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Bangli.

“Kami ingin mengangkat Bangli. Mudah-mudahan ke depan kita sinergikan lagi untuk kita bangun kebersamaan. Apapun yang ingin dicapai Bangli dan daerah-daerah lain, kami dukung, kami dorong untuk digaungkan dalam diplomasi parlemen di seluruh dunia,” tegas Putu.

Sebagaimana diketahui, *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan penyelamatan lingkungan (3P: People, Prosperity, Planet) yang ditargetkan pada 2030. Agenda global ini telah diadopsi oleh 193 negara termasuk Indonesia.

Yang menarik dari implementasi SDGs ini adalah meskipun Mandat SDGs ada di pemerintah pusat, tapi 70 persen kewenangan dalam implementasi SDGs ada di pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan di daerah harus sejalan dengan pencapaian 17 target SDGs yang sudah dicanangkan. ■ skr/es



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat kegiatan BKSAP SDGs Day di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Foto: Singgih/Man

# Parlemen Remaja 2021 Fokus Bahas UU tentang Penyiaran



Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat pembukaan Parlemen Remaja 2021. Foto: Ist/Man

**S**ekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan fokus substansi yang dibahas dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2021 adalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ia mengungkapkan, peserta Parlemen Remaja 2021 berjumlah 131 pelajar yang berasal dari seluruh SMA/SMK/MA dari 80 daerah pemilihan (dapil) di seluruh wilayah Indonesia.

“Parlemen Remaja 2021 merupakan wadah pembelajaran

demokrasi bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda. Parlemen Remaja 2021 diselenggarakan dengan tema ‘Remaja di Era Kebebasan Informasi:

Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas’. Adapun, substansi yang dibahas yaitu penyusunan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” jelas Indra usai pembukaan Parlemen Remaja 2021 yang digelar secara virtual, Senin (13/9).

Pada pembukaan Parlemen Remaja 2021 yang dihadiri Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara virtual itu, Indra menyatakan Parlemen Remaja 2021 digelar melalui proses seleksi yang sangat ketat. Yakni, dengan penilaian yang mempertimbangkan beberapa aspek penilaian seperti penilaian prestasi akademik dan non akademik, keaktifan dalam berorganisasi, pembuatan video kampanye dan penulisan esai. Indra mengungkapkan, video kampanye merupakan prasyarat dalam proses seleksi. ■ azk/es

## BK DPR Hadiri Konferensi Internasional Asia Centre

**B**adan Keahlian DPR RI turut serta dalam 6th International Conference ‘COVID-19 in Asia: Communication - Nationalism - Technology’ yang diselenggarakan Asia Centre pada 8-10 September 2021 secara daring. Dalam kegiatan ini, BK DPR RI berkesempatan

menyampaikan makalah bertema ‘Legal Instrument, Fiscal Policy, And Accountability In Response To Covid-19 Pandemics: Indonesian Perspective’.

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul menyampaikan keterlibatan BK DPR RI dalam forum tersebut untuk kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional.

“Topik-topik yang dibahas dalam forum ini sangat relevan sebagai bagian studi-studi kita untuk memperbaiki pelayanan kita pada anggota DPR, seperti tadi dibahas tentang Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang Kebencanaan,” ungkap Sensi, sapaan akrabnya, Jumat (10/9).

Lebih lanjut Sensi menjelaskan, ada banyak perspektif disampaikan dalam forum tersebut. “Semua diangkat dalam

diskusi ini, sehingga kita mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bencana Covid-19 ini. Dan berdasarkan pengalaman ini nanti kita buka adanya pemikiran untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Kekarantinaan,” ujar Sensi. ■ skr/es

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Singgih/Man



# BURT Minta JOUMPA Tingkatkan Sinergi untuk Memberikan Layanan Paripurna

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti meminta PT Garuda Angkasa meningkatkan sinergi dengan Angkasa Pura serta maskapai penerbangan (airlines) untuk memberikan pelayanan paripurna melalui JOUMPA Airport VIP Service and Lounge bagi Anggota DPR RI dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Novita Wijayanti saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR dengan VP Comercial Gapura Angkasa Uzia Siregar; EGM Angkasa Pura 2 Cabang Tanjung Karang Hendra Irawan; GM Gapura Angkasa Cabang Tanjung Karang I Wayan Jambrud; di Bandara Radin Inten II, Lampung, Rabu (8/9).

Terlebih, lanjut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu, sudah setahun lebih wabah Covid-19 masuk wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat seperti; penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan serta *physical distancing*. Kebiasaan-kebiasaan baru ini pada akhirnya mendorong terwujudnya kebijakan tatanan normal baru (*new normal*) di Indonesia.

Implementasi 'new normal' ini pada prinsipnya adalah mengatur ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan bagi Anggota DPR RI ketika berada di bandara. "BURT datang ke sini untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan fasilitas untuk Anggota DPR RI di bandara mencakup kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan prosedur keberangkatan termasuk fasilitas kesehatan serta



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti didampingi Anggota BURT DPR RI bertukar cenderamata dengan otoritas terkait di Bandara Radin Inten II Lampung. Foto: Ria/Man

layanan *lounge* sesuai protokol kesehatan," katanya.

Setelah melihat langsung fasilitasnya dan mendengar penjelasan, Novita menilai layanan JOUMPA Airport VIP Service and Lounge di Bandara Radin



**IMPLEMENTASI 'NEW NORMAL' INI PADA PRINSIPNYA ADALAH MENGATUR KETENTUAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT**

Inten II sudah baik. Namun, sinergi antar *stakeholder* perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. "JOUMPA memberikan pelayanan sudah baik, namun perlu ada perbaikan terlebih kondisi saat ini kami sedang menghadapi pandemi. Kami meminta JOUMPA bisa berkoordinasi lebih dengan angkasa pura dalam memberikan pelayanan," kata legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, VP Comercial Gapura Angkasa Uzia Siregar menjelaskan pihaknya terus memperbaiki dan memperluas layanan JOUMPA Airport VIP Service and Lounge di seluruh bandar udara. "JOUMPA saat ini tersebar di 39 bandara dari sebelumnya hanya 10 pada tahun 2018, kami berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada 575 Anggota DPR," kata Uzia kepada Tim BURT. ■ rnm/sf



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim. Foto: Azka/Man

# Perkuat Kerja Sama, Gus Muhaimin Terima Kunjungan Dubes AS

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan hubungan antara Indonesia-Amerika Serikat telah terjalin dalam periode yang cukup lama. Maka tidak bisa dipungkiri, hubungan bilateral baik antara Indonesia maupun Amerika Serikat diperkuat dengan kerja sama di berbagai sektor.

“Pada pertemuan ini, menurut saya,

kerja sama Indonesia dengan USA memiliki sejarah hubungan yang sangat panjang dan sudah terjalin dengan sangat bagus,” ungkap Gus Muhaimin usai menerima kunjungan Dubes AS untuk Indonesia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (10/9).

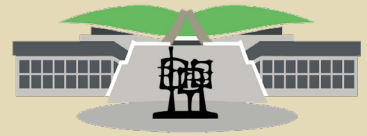
Dalam pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut, Gus Muhaimin, menekankan ada tiga konsentrasi yang menjadi pembahasan. Di antaranya mulai dari peningkatan bantuan pendidikan berupa beasiswa baik pada masa

pandemi dan pasca pandemi, peningkatan kuota bantuan vaksin Covid-19, hingga investasi dan perdagangan.

Berkaitan dengan vaksin, berdasarkan kesepakatan awal, Indonesia akan menerima kuota 4 juta vaksin dari negeri Paman Sam. Namun, terhitung hari ini Indonesia telah menerima bantuan 8 juta vaksin Covid-19 yang berasal dari AS. Selanjutnya, akan ada bantuan berupa alat-alat kesehatan.

Terakhir, berhubungan dengan investasi dan perdagangan, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan (Korkesra) itu berharap ke depannya Indonesia bisa bekerja sama dengan intensif bersama AS di berbagai sektor, salah satunya teknologi dan pariwisata.

“Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kerja sama investasi masih sangat kecil dan masih sangat mungkin investasi akan ditingkatkan lebih tinggi lagi. Oleh karena, kami berharap bisa lebih baik ke depannya,” tutup politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu. ■ ts/sf



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin pertemuan Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB, dan HPL Komisi II DPR RI dengan Kakanwil Pertanahan Kalimantan Timur, Direktur PTPN, dan otoritas BPN, di Balikpapan, Kaltim, Jumat (10/9). Foto: Husen/Man



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menyerahkan cenderamata usai memimpin diskusi Panja RUU BUMN Komisi VI DPR RI dengan para pakar Universitas Brawijaya, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9). Foto: Sofyani/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manuring bertukar cenderamata dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Farida Patittingi usai menyerap masukan RUU BUMN di Kampus Unhas, Makassar, Sulsel, Senin (6/9). Foto: Kresno/Man



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera saat memimpin kegiatan BKSAP Day di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Selasa (14/9). Foto: Andri/Man